

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Masalah wilayah perbatasan Indonesia bukan lagi menjadi hal baru saat ini. Sejak Indonesia menjadi negara yang berdaulat, perbatasan sudah menjadi masalah yang bahkan belum menemukan titik terang sampai saat ini. masalah kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan juga perlu diperhatikan yang selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari berbagai pihak, baik oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat dan masyarakat Indonesia secara umum sebagai bagian dari masyarakat internasional.<sup>1</sup>

Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat membutuhkan model pembangunan serta sentuhan pembangunan Secara Nyata” karena hampir semua kondisi kawasan perbatasan Kalimantan Barat adalah daerah tertinggal yang kondisinya sangat memprihatinkan sebagai teras depan Negara. Oleh sebab itu pemerintah dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan masyarakat perbatasan sehingga mereka akan merasa keberadaan dan perhatian negara.

Fenomena hubungan internasional tidak lagi terjadi hanya pada ruang lingkup kerjasama antara negara (bilateral, multilateral) tapi juga pemerintah daerah yang berlandaskan undang-undang No. 32 tahun 2004 memiliki peluang untuk melakukan aktivitas luar negeri, dari peluang tersebut memunculkan alternatif baru di bidang kerjasama sub-nasional aktor. Terjalannya kerjasama

---

<sup>1</sup> Zaenuddin Hudi Prasajo “*Dinamika Masyarakat Lokal Di Perbatasan*” Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 2, November 2013. jurnal di Akses, senin 25 agustus 2014 pukul 22.20 wib

antar kedua “*Sub-national actor*” diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan dapat mengurangi ketimpangan melalui kerjasama luar negeri pemerintah daerah khususnya dalam hal ini untuk masyarakat perbatasan melalui kerjasama antar sub-nasional mampu memenuhi kebutuhan dan kekurangan yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih judul **“Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Sebagai Aktor Paradiplomasi Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Aruk-Biawak”**

Dan yang terpenting, judul ini sangat menarik untuk diangkat sebab peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai kerjasama luar negeri Pemerintah Kalimantan Barat dengan Sarawak dalam perumusan kebijakan program kerjasama, sehingga mampu berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Aruk-Biawak.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Perbatasan bukan isu baru dalam lingkup nasional maupun internasional. Perbatasan merupakan salah satu isu kompleks dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Kawasan regional Asia Tenggara, perbatasan merupakan isu yang sensitif, beberapa kasus sengketa/konflik internasional bermula dari perebutan kawasan teritorial perbatasan Negara. Namun, sejauh ini sangat sedikit kajian yang menjadikan perbatasan sebagai sebuah pembahasan tersendiri. Banyaknya permasalahan mengenai kawasan perbatasan menarik untuk dibahas lebih dalam sehingga menemukan tela’ah akademis yang nantinya bisa menjadi acuan

perbatasan lintas negara. Dinamika isu perbatasan merupakan bagian kesatuan dari dinamika politik internasional yang berkembang dikawasan Asia tenggara. Fakta menunjukkan, bahwa isu perbatasan merupakan salah satu isu perenial yang menghiasi sejarah hubungan internasional di sepanjang masa.<sup>2</sup> Hal ini ditunjukkan oleh seringnya *The Permanent Court of International Justice* (PCIJ) sebagai lembaga yudisial Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nation*) dihadapkan dengan sengketa perbatasan, baik di darat maupun di laut.<sup>3</sup>

Fenomena perbatasan di Indonesia juga sering dihadapkan dengan sengketa kawasan perbatasan, seperti Simpadan-Ligitan, Tanjung Daruk, Ambalat, dan Selat Malaka. Seutuhnya kawasan perbatasan merupakan komitmen dan prioritas pemerintah yang di uraikan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993-2004, Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025.<sup>4</sup> Kemudian di ikuti dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang menetapkan arah dan

---

<sup>2</sup> Terlepas dari jarangny suatu literatur yang secara eksklusif membahas mengenai perbatasan, buku-buku yang tergolong ke dalam kategori 'the leading text- books' yang ditujukan untuk membahas 'semua' isu dalam studi hukum internasional di masa ini pun tidak menjadikan isu ini sebagai sebuah persoalan yang perlu dibahas pada bab yang tersendiri. Pada umumnya pembahasan mengenai persoalan ini dapat ditemukan secara tersebar dalam bab-bab mengenai hukum laut, wilayah dan subjek- subjek hukum internasional. Lihat misalnya, Malcolm N. Shaw, 2003, *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge; dan Malcolm D. Evans (ed.), 2003, *Internasional Law*, Cambridge University Press, Cambridge. Namun demikian ada empat buku yang secara khusus membahas perbatasan, yaitu: Malcom Shaw, 1986.

<sup>3</sup> Pengantar Hukum Internasional, (edisi kesepuluh, Buku I), Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.244-245; Martin Dixon, 1990, *Textbook on International Law*, Blackstone Press Limited, London.

<sup>4</sup> Mawardi, Ikhwanuddin, "*Strategi Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional di Kawasan Perbatasan Darat sebagai Pintu Gerbang Aktivitas Ekonomi dan Perdagangan dengan Negara Tetangga*", diunduh tanggal, 08 september 2014, dari <http://kawasan.bappenas.go.id/images/seminar/1.pdf>. Jakarta, 2010,

pengembangan wilayah perbatasan negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional, yaitu:

“Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah, terutama di kawasan timur Indonesia, daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.”<sup>5</sup>

Secara geografis perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat berada pada bagian paling utara yang membentang dari barat ke timur sepanjang 966 km.<sup>6</sup> Secara administratif ada 5 (lima) kabupaten dan 14 (empat belas) kecamatan di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Sarawak negara bagian Malaysia.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di kabupaten dan kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia Kabupaten Sambas berbatasan dengan Biawak-Teluk Melano, Kabupaten Bengkayang berbatasan dengan Lundu-Serikin, Kabupaten Sanggau berbatasan dengan Sapit, Kabupaten Sintang berbatasan dengan Bua-Laca, dan Kabupaten Kapuas Hulu berbatasan dengan Rejang-Taroh.

Kabupaten Sambas merupakan satu dari 5 kabupaten secara administratif yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak.<sup>7</sup> Perbatasan Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas merupakan beranda depan, Letak geografis wilayah berbatasan langsung dengan Biawak-Sarawak. Adapun letak geografis tersebut dapat dilihat pada gambar lokasi berikut:

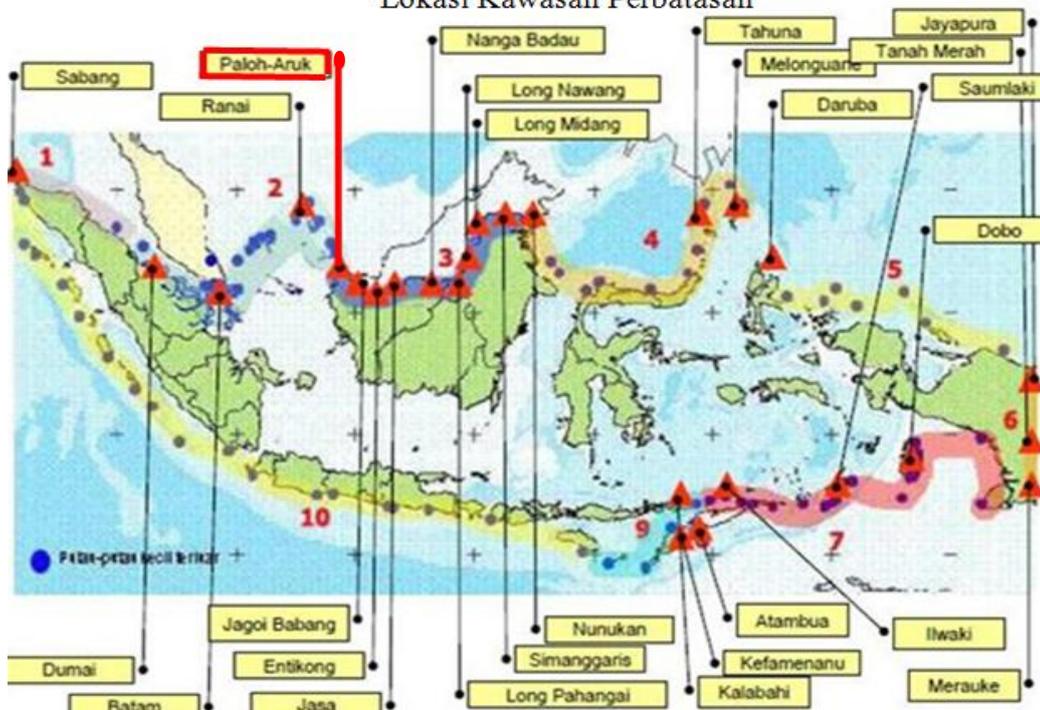
---

<sup>5</sup> “Strategi Dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara” Departemen permukiman Dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Edisi Juli 2002

<sup>6</sup> Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Kalimantan Barat (BPKPK Kalbar), 2013.

<sup>7</sup> “Kawasan Perbatasan Kalimantan” Di unduh pada tanggal 25 agustus 2014 dari; <http://kalimantan.menlh.go.id/index.php/public/info/detail/berita/349>

**Gambar 1.1**  
Lokasi Kawasan Perbatasan



Sumber: di olah dari PP No. 26 tahun 2008. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). di kutip melalui Upnjatim.ac.id

Kawasan perbatasan Aruk-Biawak sangat memprihatinkan, sebelum dibangunnya pos lintas batas karena sangat terbelakang dan terisolir (Indikator daerah tertinggal dan aksesibilitas rendah) fakta yang terjadi diberanda depan negara, minimnya infrastruktur dan lemahnya pelayanan publik untuk masyarakat menunjukkan wacana pembangunan di kawasan perbatasan hanya bersifat sektoral. Diperangkat terbawah tidak memberikan pelayanan pada hari aktif kerja, hal ini menandakan pemerintah ditingkat paling bawah tidak bisa melayani kebutuhan masyarakat Aruk.<sup>8</sup>

Masyarakat perbatasan Aruk tidak merasa adanya keberadaan Indonesia sebagai negara, bahkan masyarakat perbatasan Aruk sempat menolak rupiah. Perhatian Sarawak ditengah keterbatasan masyarakat perbatasan Aruk membuat

<sup>8</sup> Observasi penulis dilapangan, 23 agustus 2014.

masyarakat Aruk menganggap Malaysia lebih ada bagi mereka. Selama ini, kebutuhan masyarakat terpenuhi oleh negara tetangga, seperti pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 10 kilometer, dan penerangan listrik. Pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh negara tetangga merupakan akses utama masyarakat perbatasan Aruk untuk memenuhi kebutuhan mereka ke negara tetangga. Akses jalan tersebut mempermudah masyarakat untuk menjual hasil panen, serta kebutuhan akan pasokan listrik masyarakat perbatasan Aruk untuk menjalankan aktivitas mereka.

Kompleksnya permasalahan perbatasan berdampak luas terhadap lemahnya tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan. Rencana Pembangunan selama ini hanya berupa rancangan diskriptif yang belum bisa di implementasikan.<sup>9</sup> Disamping itu, ironisnya krisis kepercayaan antar badan pengelola, banyaknya instansi yang mengajukan Anggaran untuk pembangunan kawasan perbatasan dari berbagai perspektif.<sup>10</sup> Permasalahan domestik adalah Pembangunan perbatasan dihadapkan dengan persoalan yang berkebutuhan pada egosentris, keinginan kuat untuk revitalisasi kawasan perbatasan agar tidak terisolir dan terbelakang, namun, semangat tersebut lebih dimotivasi oleh kompetisi politis.

Di sahkannya UU No 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah memberi ruang lebih bagi pemerintah daerah untuk mengelola dirinya sendiri. Desentralisasi membawa harapan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah

---

<sup>9</sup> Suratman, E. Kawasan Perbatasandan Pembangunan Daerah. Untan Press. Pontianak. 2008

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum-Departemen Dalam Negeri, *“Perbatasan Antar Negara”*, Makalah dipresentasikan pada acara Seminar Nasional: *Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Rangka Menjaga Keutuhan*

untuk lebih aktif dalam mengelola dan membangun daerahnya. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat memiliki kewenangan untuk mengelola pembangunan di perbatasan walaupun faktanya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum mampu mengoptimalkan pembangunan dikawasan perbatasan. Dengan adanya desentralisasi pemerintahan diharapkan mampu menstimulus pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya khususnya kawasan perbatasan Aruk.

Selama ini masyarakat perbatasan Aruk telah melakukan aktivitas luar negeri *people to people* untuk memenuhi kebutuhan mereka dan itu mereka lakukan turun temurun, bahkan sebelum negara sampai negara ada juga tidak terasa keberadaannya oleh masyarakat Aruk. Kalimantan Barat dalam konteks kerjasama formal dengan Sarawak telah menjlain hubungan 30 tahun. Kerjasama Pemerintah Kalimantan Barat dengan Sarawak pertama kali diciptakan oleh Dato' Musa Hitam, Wakil Perdana Menteri Malaysia, dan juga ketua General Border Committee (GBC) Malaysia.<sup>11</sup> Berdasarkan laporan dari Ketua Gabungan Malaysia-Indonesia, maka ketua gabungan General Border Committee Malaysia dan Indonesia di sesi ke-13 yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 3 Desember 1984 telah diputuskan dan diperintahkan sebagai berikut:

*"Staff Planning Committee (SPC) to form a Committee / Joint Surgeon in charge of the power to plan and coordinate the development of socio - economic relations between the Kingdom of Malaysia and the Government of the Republic of Indonesia for security / safety related border areas between the two countries".*

---

<sup>11</sup> Lahnisafitra, I. *Pentingnya Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia - Indonesia (Sosek Malindo) dan Kaitannya dengan Pertumbuhan Sub Regional ASEAN*, Conducted by Post Graduate School UGM, Yogyakarta, May 27 – 29, 2008.

Secara historis hubungan antara Pemerintah Kalimantan barat dengan Sarawak sudah terjalin lama. Tetapi kerjasama hanya menitikberatkan pada *security approach* untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kalimantan barat dengan Sarawak aktif dalam melakukan kerjasama yang berlandaskan pada sosio-kultural, sehingga mempermudah komunikasi dan interaksi antar kedua sub-nasional. Melalui landasan kultural yang didukung dengan UU 32 tahun 2004 pemerintah daerah Kalimantan Barat lebih aktif dalam melakukan kerjasama untuk pembangunan tapal batas khususnya perbatasan Aruk-Biawak.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka terdapat sejumlah kelebihan dari model kerjasama sosio-kultural yang dibangun oleh pemerintah Kalimantan Barat dengan Sarawak, karena akan memunculkan keuntungan bersama, program kerjasama yang digagas menyesuaikan kebutuhan masyarakat perbatasan.<sup>12</sup>

Selanjutnya intensitas kerjasama lintas batas antara kedua wilayah semakin tinggi, untuk mengatur lalu-lintas barang (*Traditional Market*) antar masyarakat perbatasan, maka kedua pemerintahan Indonesia dan Malaysia membuat sebuah kesepakatan *Border Trade Agreement* (BTA) atau “Perjanjian Tentang Perdagangan Lintas Batas antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Malaysia.” Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 1970 di

---

<sup>12</sup> Asmarani, Suni, dan Nugrahaningsih. *Kerjasama Sosial Dan Ekonomi Malaysia-Indonesia* (Sosek-malindo), (Studi Kasus Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Sambas). PMIS-UNTAN-PSIP-2014. hal.9

Jakarta. Salah satu isi kesepakatannya berupa kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia atau disingkat menjadi Sosek Malindo.

Visi dari kerjasama Sosek Malindo ini adalah. *”Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua daerah melalui kerjasama Sosek Malindo menuju 2020.”*

Kerjasama Sarawak dengan Kalimantan Barat yang sudah terbangun sejak lama juga harus mengikuti prosedur perjanjian perdagangan lintas batas. Dalam kerjasama Sosek-Malindo dan perjanjian perdagangan lintas batas dari tahun ketahun menunjukkan kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari semakin luasnya bidang kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kalimantan barat dengan dan Sarawak, meskipun masih banyak ditemui hambatan yang harus diatasi oleh kedua belah pihak.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah Program Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Sarawak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Aruk-Biawak?

### **D. Tujuan Penelitian**

Melalui penulisan skripsi beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Mengetahui permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat perbatasan Aruk-Biawak, yang selama ini terisolir.

2. Mengetahui kendala pembuatan kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat dalam pembangunan di kawasan perbatasan Aruk-Biawak.
3. Mengetahui program kerjasama bilateral antara Pemerintah Kalimantan Barat dengan Sarawak-Malaysia dalam menstimulus perkembangan pembangunan kawasan perbatasan.
4. Berkontribusi terhadap kajian perbatasan dalam bidang kerjasam luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah kedepannya bisa dijadikan sebagai upaya *grand design* pembangunan kawasan perbatasan di Indonesia.
5. Mengetahui *role model* pengembangan pembangunan kawasan perbatasan dalam kerangka kajian *paradiplomasi* dan Memperkaya kajian Ilmu Hubungan Internasional (Kajian Kawasan Perbatasan).

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka dasar pemikiran pada prinsipnya bertujuan untuk membantu penulis menentukan tujuan dan arah penulisan, serta memilih konsep dan teori untuk menyusun hipotesa. Untuk menjawab fenomena diatas penulis menggunakan konsep pemikiran sebagai ujung tombak bagi unit analisa ini. Konsep sendiri di artikan sebagai salah satu simbol paling penting dalam bahasa. Menurut *Mochtar Masoed* konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek, atau suatu fenomena tertentu. Sehingga konsep sebenarnya merupakan sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan atau fenomena tertentu. Ia bukan sesuatu yang asing, kita menggunakannya sehari-hari untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks dengan mengkategorikan hal-hal

yang kita temui berdasar ciri-cirinya yang relevan bagi kita.<sup>13</sup> Pada penelitian ini akan menggunakan konsep paradiplomasi dan teori proses pembuatan kebijakan.

## 1. Konsep Paradiplomasi

Dalam pelaksanaan hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada kerjasama *Province-City* tidak lepas dan didasarkan aturan yang berlaku dalam otonomi daerah, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah:

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Ivo Duchacek dan Panayotis Soldatos, konsep paradiplomasi adalah:

*“Refers to direct international activity by sub-national actors (federated units, regions, urban communities, cities) supporting, complementing, correcting, duplicating or challenging the nation-states’ diplomacy.” (Soldatos, 1990:17).*<sup>14</sup>

Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas “*Sub-State*”, Dalam rangka kepentingan secara spesifik. Paradiplomasi merupakan desentralisasi kekuasaan politik dan kewenangan administratif dalam sebuah proses yang terjadi pada aktor-aktor sub-nasional, Institusi politik dan kebijakan publik suatu Pemerintahan pusat dalam kewenangan menjalankan hubungan luar negeri.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Mochtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990, hal. 93-94.

<sup>14</sup> Anayotis Soldatos, “*An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign-policy Actors*” in Hans J. Michelmann and Panayotis Soldatos (eds), *Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units*, Oxford: Clarendon Press, 1990, pp.17.

<sup>15</sup> Takdir Ali Mukti op.cit Hal.37

Kerjasama luar negeri Kalimantan Barat dengan Sarawak di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pariwisata Merupakan stimulus pembangunan bagi masyarakat diwilayah perbatasan. Hal ini terbukti dalam pelaksanaan kesepakatan yang telah diambil dalam beberapa pertemuan, baik tingkat Pusat atau tingkat Daerah dan menyempurnakan kebijakan dalam meningkatkan pelaksanaan kesepakatan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat atau Peringkat Negeri Sarawak, Malaysia.<sup>16</sup>

## **2. Teori Proses Pembuatan Kebijakan**

Kebijakan domestik maupun global merupakan salah satu “produk” dari *decision making process*. Sehingga memiliki hubungan yang saling terkait dimana segala yang terjadi dalam *decision making process* akan mempengaruhi kebijakan. Dalam proses pembuatan kebijakan terkait kebijakan pembangunan perbatasan, terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi kebijakan pembangunan perbatasan yaitu faktor pengaruh internal dan eksternal. Dari sisi internal yaitu pengaruh yang berada pada level domestik, misalnya lembaga pengelola, daerah, dan pemerintah pusat. Sedangkan dari sisi eksternal adalah kebijakan luar negeri merupakan aktivitas yang lintas batas negara dan dipengaruhi oleh faktor diluar negara, misalnya adalah geopolitik, karakter negara lain.

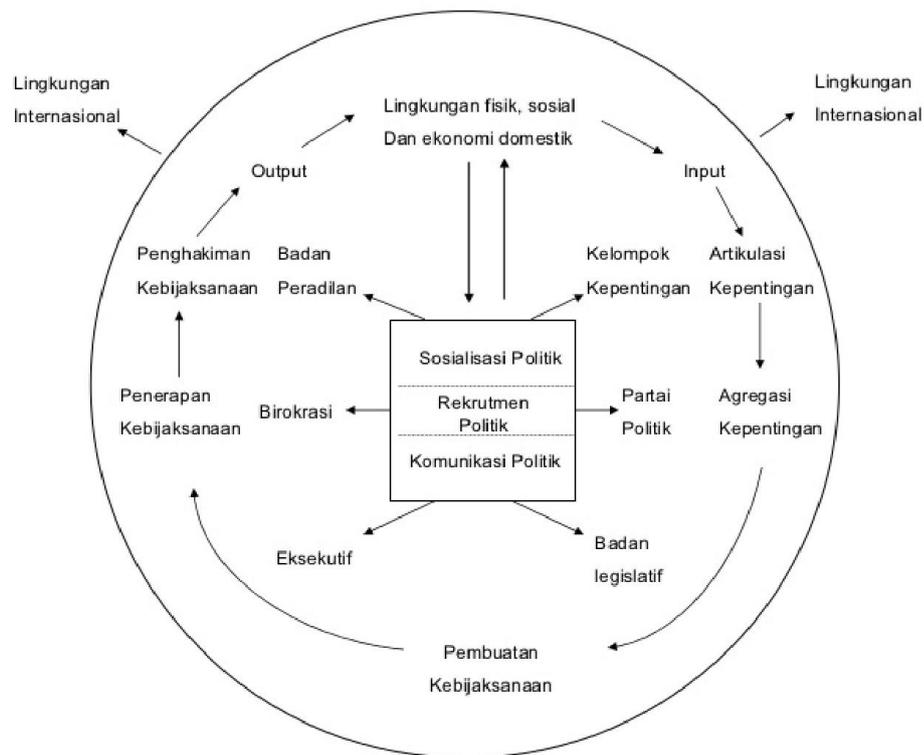
Prof.Gabriel A. Almond membahas unsur dasar pendekatan perbandingan dalam menganalisa berbagai jenis sistem politik. Menurut Almond, sistem politik adalah merupakan sistem interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka.

---

<sup>16</sup> “JR Kalbar Hadiri Sidang Ke-28 Kk/Jkk Sosek Malindo Kalbar-Negeri Serawak” di akses pada hari selasa 1 juli 2014, pukul 06.13 dari <http://www.jasaraharja.co.id/jr-kalbar-hadiri-sidang-ke-28-kkjkk-sosek-malindo-kalbar-negeri-serawak,127582.html>

Sistem itu menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Almond menggunakan pendekatan perbandingan dalam menganalisa jenis sistem politik, yang mana harus melalui tiga tahap, yaitu:<sup>17</sup> a) Tahap mencari informasi tentang subjek. b) Memilah-milah informasi yang didapat pada tahap satu berdasarkan klasifikasi tertentu, dan c) Dengan menganalisa hasil pengklasifikasian itu dapat dilihat keteraturan (*regularities*) dan hubungan di antara berbagai variabel dalam masing-masing sistem politik.

**Gambar 1.2.**  
Sistem Politik: Struktur dan Fungsi<sup>18</sup>



**Diagram Sistem Politik dalam S truktur dan Fungsi Politik (Gabriel Almond)**

<sup>17</sup>Mohtar Mas'oe'd & Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press. 2001. Hal.21-26

<sup>18</sup> Mohtar Mas'oe'd & Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*. Hal.30.

Struktur dan budaya politik dalam kerangka kerja sistem politik memegang peran penting. Gabriel Almond mengatakan, sistem politik merupakan organisasi melalui masyarakat, merumuskan dan berusaha mencapai tujuan bersama. Singkatnya sistem politik melaksanakan berbagai kegiatan yang ditunjukkan untuk meraih tujuan-tujuan bersama yang telah dirumuskan.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan yang kompleks ini, sistem politik memerlukan badan-badan dan struktur-struktur yang bekerja dalam sistem politik seperti, parlemen, birokrasi, badan peradilan, dan partai politik yang melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi tertentu. Pelaksanaan fungsi-fungsi inilah yang pada akhirnya membuat sistem politik bekerja, dalam arti mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan.<sup>19</sup>

Dalam konteks ini, komunikasi politik mengalir tidak hanya dari penguasa politik atau pemerintahan ke masyarakat atau warga negara, tetapi juga sebaliknya. Apa yang sering disebut sebagai artikulasi dan agregasi kepentingan pada dasarnya berlangsung melalui mekanisme komunikasi politik dalam bangunan sistem politik.

Di pinggir lingkaran gambar 1.2 terdapat fungsi-fungsi yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan kebijaksanaan dalam setiap sistem politik. Sebelum kebijakan dan tujuan ditetapkan, individu dan kelompok masyarakat harus menentukan apa yang menjadi kepentingan mereka, yaitu apa yang ingin mereka dapatkan dari politik. Kepentingan dan tuntutan ini kemudian digabungkan menjadi alternatif kebijakan. panah di pinggir kanan dalam gambar

---

<sup>19</sup>*Ibid. hal.31*

1.2 diatas dari *artikulasi kepentingan* mengarah ke *agresi* atau *penggabungan kepentingan*. Selanjutnya alternatif kebijakan itu dipertimbangkan dan ditentukan pilihan. Keputusan ini harus dilaksanakan, dan bila keputusan itu ditentang atau disalahgunakan maka harus ada proses *penghakiman*.

Penerapan kebijakan pemerintah yang disebut *outputnya* sistem politik mempengaruhi kehidupan ekonomi, struktur sosial, dan kebudayaan dari masyarakat. Pengaruh-pengaruh terhadap masyarakat ini selanjutnya mempengaruhi tuntutan berikutnya yang diajukan pada sistem politik. Dengan demikian konsep fungsional ini menggambarkan kegiatan-kegiatan dan proses berlangsung dalam setiap masyarakat tanpa memandang struktur dari sistem politiknya ataupun kebijakan umumnya yang ditempuh. Dengan memahami fungsi ini dapat memperbandingkan berbagai sistem politik yang berbeda dengan lebih baik.

Aplikasi dari teori proses pembuatan kebijakan terhadap regulasi internal dan eksternal, dalam internal proses pembuatan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan program pembagunan di wilayah perbatasan. Sedangkan dari eksternal adalah menganalisa proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat dengan Sarawak sehingga terjadi sebuah kesepakatan.

Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat dan daerah idealnya dapat mengembangkan pembangunan masyarakat di wilayah perbatasan Aruk. Disamping itu, aktivitas kerjasama luar negeri yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat dengan Sarawak terus berkembang

seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Namun, dalam ranah implementasi kebijakan ditemukan permasalahan untuk efektifitas pelaksanaan kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan.

Hal ini juga ditegaskan oleh Dwidjowijito bahwa implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini pada masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul dilapangan. Sehingga, Pemerintah pusat dan Pemerintah Kalimantan barat belum mampu mewujudkan harapan masyarakat di perbatasan Sajingan Besar (Aruk-Biawak) melalui beberapa kebijakan yang telah di formulasikan untuk kawasan perbatasan Aruk-Biawak.<sup>20</sup> Dari pemaparan diatas dapat diidentifikasi secara kritis bahwa dari perumusan sampai dengan implementasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah masih mengalami masalah. Dampak masalah kewenangan tersebut berakibat langsung terhadap ini masyarakat di kawasan perbatasan Aruk-Biawak.

#### **F. Hipotesa**

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka dapat dikemukakan hipotesa sebagai berikut: Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan Sarawak aktif dalam pembuatan kebijakan program kerjasama luar negeri dalam bidang sosial, ekonomi, energi, budaya, dan pariwisata. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan Aruk-Biawak.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis permasalahan yang dirumuskan. Sehingga peneliti membatasi

---

<sup>20</sup> Dwidjowijoto, R. N, Opcit hal.11

penelitian yang akan diteliti. Peneliti mengarahkan penelitian ini pada kerjasama peningkatan kesejahteraan masyarakat diperbatasan Aruk-Biawak yaitu tujuan pemerintah provinsi Kalimantan barat dengan Sarawak Malaysia dalam menjalin kerjasama dan juga realisasi kerjasama ini dalam bidang pembangunan perbatasan, sosial, ekonomi, budaya dan pariwisata.

Adapun peneliti menetapkan jangkauan penggunaan data dalam penelitian kerjasama antara pemerintah provinsi Kalimantan barat dengan Sarawak-Malaysia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan data dan fakta sebelum tahun 2010 sebagai unit eksplanasi yang memperkuat analisis, terutama dalam melihat perkembangan kebijakan pemerintah terkait pembangunan perbatasan sebagai referensi atau catatan saja yang berfungsi memperjelas data yang telah ada.

#### **H. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan studi kepustakaan cetak maupun digital, baik yang berasal dari sumber-sumber pemerintah, praktisi, maupun akademisi. Oleh karena itu data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur, majalah, surat kabar, serta informasi yang peneliti peroleh melalui internet. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisa dengan menggunakan kerangka dasar teori maupun konsep yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Mengawali penelitian ini, peneliti Penulis telah mendapat beberapa data telah melakukan observasi lapangan ke perbatasan Aruk-Biawak. Sehingga peneliti mendapatkan data primer awal yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Namun tidak menutup kemungkinan, peneliti mengumpulkan data-data primer yang baru untuk menguatkan argumentasi dalam penelitian ini.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan skripsi ini dipaparkan sebagai berikut:

**BAB I** : Bab ini berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Bab dua menguraikan tentang profil pemerintah provinsi Kalimantan Barat, dan Letak geografi perbatasan Aruk-Biawak. Pada sub-bab akan menjelaskan peran Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP), dan peran pemerintah daerah Kalimantan Barat melalui Badan pengelola perbatasan dan daerah tertinggal (B2PDT). Selanjutnya, akan dijelaskan beberapa kewenangan pemerintah pusat dan daerah Kalimantan Barat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Aruk-Biawak.

**BAB III** : Bab tiga membahas tentang kerjasama luar negeri pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Sarawak. Selanjutnya akan membahas program dan hasil kerjasama sosial ekonomi Malaysia-Indonesia anatar pemerintah provinsi kalimantan barat dengan Sarawak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarkat diperbatasan Aruk-Biawak.

**BAB IV** : Bab empat analisa kerjasama luar negeri pemerintah daerah Kalimantan Barat dengan Sarawak sebagai aktor dalam pembuatan kebijakan dan implementasi program kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan Aruk-Biawak. Selain itu juga, membahas hasil nyata dari beberapa bidang kerjasama pemerintah Kalimantan barat dengan Sarawak dibidang sosial, ekonomi, energi, budaya dan pariwisata. Kemudian menguraikan argumentasi masyarakat terhadap hasil kerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Aruk-Biawak.

**BAB 5** : Bab lima berisi kesimpulan, yang menguraikan kesimpulan atas kerjasama luar negeri pemerintah daerah Kalimantan Barat dengan Sarawak dalam pembuatan kebijakandan sebagai aktor paradiplomasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan Aruk-Biawak, sehingga dapat di jadikan *model pembangunan perbatasan* oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan.